



UNIVERSITAS TERBUKA

FSAP4001

PANDUAN BERPRAKTIK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK



Nur Ambia Arma, M.AP

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku panuan praktik implementasi kebijakan publik sebagai acuan kerja dalam melakukan praktik lapangan bagi mahasiswa dan dosen dapat terselesaikan dengan baik.

Disamping itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan buku ini dan telah memberikan dukungan moril maupun materiil, sehingga penyusunan buku ini dapat berlangsung dengan baik.

Penulis menyadari terdapat kekurangan dan keterbatasan informasi sebagai data pendukung dalam memperkaya ilmu di dalam buku ini, namun tidak menyurutkan langkah kami untuk memberikan kontribusi positif dalam dunia akademis maupun dunia praktis.

Tangerang Selatan, Juni 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
A. Pendahuluan	1
B. Tujuan.....	2
C. Ruang Lingkup.....	3
D. Kegiatan Praktik.....	3
Ketentuan Praktik.....	3
Prosedur Mata Kuliah Berpraktik.....	6
E. Penilaian Pelaporan.....	9
Prosedur Penilaian.....	9
Kriteria Penilaian.....	9
F. Monitoring dan Evaluasi.....	12
G. Daftar Istilah.....	12

A. PENDAHULUAN

Pendidikan bidang Administrasi Publik pada banyak perguruan tinggi di Indonesia menggunakan standar pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dimana terdiri atas berbagai kompetensi seperti kompetensi sikap, pengetahuan atau teoritik, dan kompetensi keterampilan, baik keterampilan umum maupun keterampilan khusus. Begitupun di Universitas Terbuka yang harus mengungkap ke-empat kompetensi tersebut. Pada aspek kompetensi teoritis di Universitas terbuka diperoleh melalui proses pembelajaran jarak jauh. Dengan sistem jarak jauh ini, mahasiswa dituntut untuk belajar secara mandiri dengan membaca Buku Materi Pokok (BMP) yang telah disediakan melalui perpustakaan digital UT. Selain itu, mahasiswa juga diberikan opsi bantuan belajar melalui beberapa cara seperti melalui tutorial online, tutorial webinar, maupun tatap muka. Bantuan belajar ini merupakan salah satu cara yang diberi Universitas Terbuka untuk membantu mahasiswa mencapai pembelajaran sesuai dengan bidang kompetensinya.

Prodi Administrasi Publik memiliki visi “Menghasilkan lulusan kompeten di bidang Administrasi Publik yang berkarakter dan berdaya saing global melalui pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh”. Untuk mencapai visi tersebut, salah satu capaian pembelajaran yang diusung adalah diharapkan mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi kebijakan publik dengan menggunakan prinsip-prinsip, metode kuantitatif dan metode kualitatif dalam keseluruhan siklus kebijakan (formulasi, implemmentasi, dan evaluasi). Oleh karena itu, sejalan dengan sistem pendidikan jarak jauh, mahasiswa tidak lagi hanya diarahkan memahami aspek pengetahuan dari teoritis saja, namun juga diperlukan kemampuan berupa keterampilan berpraktik agar mahasiswa lebih mengetahui proses khususnya pada implementasi kebijakan publik.

Implementasi Kebijakan Publik merupakan salah satu mata kuliah berpraktik di Prodi Administrasi Publik yang merupakan kegiatan pembelajaran dan mencari pengalaman melalui Laboratorium Public Administration and Governance (PAG) UT. LAB PAG berfungsi sebagai wadah pengembangan kajian, praktik, dan produksi pengetahuan di bidang administrasi publik dan tata kelola pemerintahan, termasuk terkait Implementasi Kebijakan Publik. Melalui Lab. PAG, mahasiswa diarahkan untuk mengintegrasikan teori dengan praktik, mengembangkan analisis berbasis kasus nyata, serta menghasilkan produk akademik dan atau media pembelajaran yang aplikatif dan kontekstual. Keberadaan laboratorium ini diharapkan dapat memperkuat kompetensi analitis, inovatif, dan kolaboratif mahasiswa dalam merespons berbagai tantangan kebijakan publik di tingkat lokal maupun nasional.

Lebih lanjut, implementasi kebijakan publik merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan oleh seorang pelaksana atau disebut sebagai implementator dengan tujuan merealisasikan suatu program pemerintah sehingga menunjukkan hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu, Mata Kuliah Berpraktik Implementasi Kebijakan Publik (IKP) ini dimaksudkan agar mahasiswa melihat dan menganalisis secara langsung bagaimana sebuah kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, dijalankan secara faktual atau nyata. Dengan adanya pembelajaran dengan pengalaman (*experiential learning*) ini, mahasiswa dapat menerapkan berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam pembelajaran yang utuh dan terintegrasi pada kondisi riil. Mata kuliah IKP ini berbobot 3 (tiga) sks. Setiap mahasiswa Administrasi Publik wajib menempuh atau melaksanakan praktik terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Matakuliah Berpraktik IKP ini dilakukan mahasiswa dengan cara wawancara, mengobservasi dan menganalisis kenyataan di lapangan untuk melihat apakah suatu kebijakan telah diimplementasikan dengan baik.

Pelaksanaan Praktik Implementasi Kebijakan Publik (PIKP) akan menjadi panduan bagi mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugas praktik yang diberikan. Mulai dari penjelasan persyaratan registrasi mata kuliah; skema mata kuliah berpraktik; penjelasan setiap pengerjaan tugas 1, tugas 2, dan tugas 3; hingga tata cara menulis laporan praktik.

B. TUJUAN

Panduan pelaksanaan Praktik Implementasi Kebijakan Publik (PIKP) pada Program Studi S-1 Administrasi Publik FHISIP-UT, disusun dengan tujuan agar mahasiswa memiliki kesamaan persepsi dan acuan dalam melaksanakan PIKP. Secara khusus tujuan kegiatan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan mata kuliah

Tujuan mata kuliah Implementasi Kebijakan Publik adalah agar mahasiswa mampu menganalisis sejarah, konsep, definisi, dan model-model pendekatan dari teori implementasi kebijakan publik dalam birokrasi pemerintahan berdasarkan perspektif tata kelola pemerintahan baru (*new publik governance*) dalam paradigma administrasi publik.

2. Tujuan kegiatan praktik dan kompetensi

Tujuan kegiatan praktik dalam mata kuliah ini sekaligus kompetensi yang harus dicapai mahasiswa adalah:

- a. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan isu atau fenomena implementasi kebijakan publik yang relevan dalam konteks birokrasi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Mahasiswa dapat menghubungkan isu tersebut dengan teori dan model implementasi kebijakan publik secara kritis dan analitis;
- c. Mahasiswa menganalisis secara sistematis proses dan dinamika implementasi kebijakan termasuk aktor-aktor, konteks, dan faktor pendukung/penghambat, dengan menggunakan pendekatan kolaboratif dan partisipatif dalam tata kelola pemerintahan
- d. Mahasiswa dapat mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan berdasarkan indikator yang digunakan, keterlibatan pemangku kepentingan, dan dampaknya terhadap publik;
- e. Mahasiswa dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang konstruktif dan aplikatif dengan mempertimbangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai elemen kunci *new publik governance*.

C. RUANG LINGKUP

Panduan Praktik Implementasi Kebijakan Publik (PIKP) ini secara umum berisi tentang:

1. Kegiatan praktik
2. Penilaian kegiatan praktik
3. Monitoring dan evaluasi.

D. KEGIATAN PRAKTIK

Ketentuan Praktik

1. Persyaratan

a. Mahasiswa

Adapun yang menjadi persyaratan atau ketentuan bagi mahasiswa yang dapat mengikuti praktik mata kuliah Implementasi Kebijakan Publik adalah sebagai berikut :

- 1) Telah mendaftarkan mata kuliah Implementasi Kebijakan Publik (FSAP4001)
- 2) Telah menempuh minimal 35 Sks (semester tiga) dari keseluruhan 38 sks yang harus ditempuh (mahasiswa Sipas dan Non Sipas)
- 3) Pelaksanaan Praktik dapat dilakukan secara individu atau secara berkelompok yaitu dalam 1 kelompok minimal tiga mahasiswa dan maksimal lima mahasiswa
- 4) Bagi Mahasiswa Alih kredit/ RPL Minimal telah menempuh 2 (dua) semester perkuliahan pada program studi yang sedang ditempuh di Universitas terbuka.

2. Tugas dalam pelaksanaan berpraktik

a. Mahasiswa

Sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan kegiatan praktik mata kuliah Implementasi Kebijakan Publik, maka mahasiswa memiliki tugas sebagai berikut:

1) Tugas 1 : Identifikasi Isu/Fenomena Kebijakan dan Studi Literatur

Mahasiswa pertama kali harus memilih dan mendeskripsikan secara ringkas suatu isu atau fenomena implementasi kebijakan publik yang aktual di tingkat lokal, regional, atau nasional. Kemudian setelah menetapkan isu/fenomena, mahasiswa menyusun kajian teori yang berkaitan dengan implementasi kebijakan termasuk memilih dan menetapkan model dan pendekatan yang relevan.

2) Tugas 2 : Pengumpulan Data Implementasi Kebijakan

Tugas kedua adalah melakukan pengumpulan data dari hasil identifikasi fenomena kebijakan yang dipilih sebelumnya. Dalam mengumpulkan data, mahasiswa dapat memilih melakukan observasi lapangan, wawancara singkat, atau studi dokumentasi sebuah proses implementasi kebijakan. Hasil pengumpulan data ini di rekam dan diolah untuk kemudian di analisis pada tugas berikutnya.

3) Tugas 3 : Laporan Praktik (Analisis dan Interpretasi Implementasi Kebijakan)

Setelah tahapan memilih isu, menetapkan teori, mengumpulkan data yang relevan hingga melakukan analisis, mahasiswa kemudian menyusun laporan akhir dari hasil analisis implementasi kebijakan publik. Di dalam laporan juga disertakan rekomendasi yang bisa diberikan.

b. Tutor

Agar memastikan kegiatan mata kuliah berpraktik Implementasi Kebijakan Publik dapat berjalan efektif dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah, maka tutor/pembimbing memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan awal kepada mahasiswa mengenai teknis pelaksanaan praktik, termasuk penjelasan tentang tujuan, ruang lingkup kegiatan, metode pengumpulan data, dan format pelaporan;
- b. Membimbing proses identifikasi isu kebijakan, termasuk memberikan masukan terhadap kelayakan topik, relevansi isu, serta potensi kontribusi analisis terhadap pengembangan kebijakan publik;

- c. Membantu mahasiswa dalam penetapan teori dan pendekatan analisis, khususnya agar selaras dengan paradigma *new publik governance* dan kerangka implementasi kebijakan yang tepat;
- d. Melakukan pendampingan secara berkala melalui diskusi individu atau kelompok, untuk memastikan kemajuan kegiatan praktik;
- e. Memberikan umpan balik konstruktif terhadap draf laporan yang disusun mahasiswa sebelum dikumpulkan sebagai laporan akhir;
- f. Melakukan penilaian terhadap tugas-tugas mahasiswa.

c. Program Studi

Tugas program studi antara lain:

- a. Memastikan panduan tersedia dan diperoleh/dapat diakses oleh mahasiswa dan tutor;
- b. Berkoordinasi dengan tutor;
- c. Melakukan sosialisasi kepada UT Daerah, tutor dan mahasiswa; serta
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi.

3. Kewajiban dalam pelaksanaan berpraktik

a. Mahasiswa

Selain tugas, mahasiswa juga harus memperhatikan kewajibannya. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi mahasiswa adalah:

- 1) Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan tutorial dan praktik sesuai jadwal dan arahan tutor;
- 2) Menjaga etika akademik selama proses pengumpulan data, termasuk dalam wawancara, observasi dan penyusunan laporan (tidak melakukan plagiarisme);
- 3) Mengumpulkan laporan tepat waktu dan mengikuti prosedur evaluasi yang telah ditentukan;
- 4) Berpartisipasi aktif dalam diskusi, tugas, pembimbingan, serta kegiatan tutorial webinar;
- 5) Konsisten dalam mengikuti pelaksanaan Praktik Implementasi Kebijakan Publik
- 6) Mampu menjaga nama baik almamater serta mampu mengikuti tata tertib di tempat praktik.

b. Tutor

Selain tugas, tutor juga memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 1) Menyediakan waktu bimbingan secara terjadwal dan konsisten sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan jadwal akademik yang telah ditetapkan;
- 2) Menjaga obyektivitas dan profesionalisme dalam membimbing serta menilai hasil kerja mahasiswa;
- 3) Mendorong integritas akademik dengan memastikan bahwa mahasiswa memahami dan menerapkan etika penelitian dan penyusunan laporan;
- 4) Mendokumentasikan proses bimbingan sebagai bagian dari pelaporan kegiatan praktik mata kuliah Implementasi Kebijakan Publik;
- 5) Berkoordinasi dengan koordinator mata kuliah atau ketua prodi dalam hal pemantauan, kendala teknis, atau evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan praktik.

Prosedur Mata Kuliah Bepraktik

1. Materi Praktik Kebijakan Publik

a. Isu/Fenomena Implementasi Kebijakan

Mahasiswa harus mencari isu atau fenomena yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan kemudian dianalisis bagaimana implementasi kebijakan tersebut selama ini. Dalam hal ini mahasiswa melakukan observasi langsung (penelitian) atau melalui kajian (*literature review*).

b. Teori/Konsep Implementasi Kebijakan

Konsep IKP Dalam pelaksanaan praktik, Mahasiswa dapat memilih salah satu materi berikut :

- 1) Implementasi Kebijakan: *Perspektif Policy Networks* dan Manajemen Jaringan
- 2) Implementasi Inovasi Kebijakan Publik dan Pengembangan Kapasitas dalam Implementasi Kebijakan Publik
- 3) Implementasi Kebijakan Publik: *Perspektif Collaborative Governance*
- 4) Implementasi Kebijakan Publik: Perspekti dan Perspektif *Collaborative Advantage*
- 5) Dan konsep lainnya yang terdapat dalam modul Implementasi Kebijakan Publik FSAP4001.

2. Waktu Pelaksanaan Praktik Implementasi Kebijakan Publik

Pelaksanaan mata kuliah berpraktik Implementasi Kebijakan Publik akan ditempuh pada semester 3 (tiga) atau mahasiswa sudah menempuh minimal 35 SKS total dari 145 SKS.

Sedangkan untuk pelaksanaan mata kuliah berpraktik dilaksanakan selama 8 sesi (Tuton) dengan bentuk praktik akan diintegrasikan pada tugas 1, tugas 2 dan tugas 3. Dalam praktik ini, mahasiswa akan dibimbing tidak hanya melalui tutorial online, namun juga melalui tutorial webinar sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada sesi 4, sesi 6, dan sesi 8. Tujuan pembimbingan melalui tutorial ini untuk menguatkan hasil pengerjaan tugas praktik mahasiswa. Adapun secara detail, skema dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Skema Tuton Mata Kuliah Berpraktik

3. Tata Cara Pelaksanaan Praktik Implementasi Kebijakan Publik

Mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Implementasi Kebijakan Publik wajib mengikuti tata cara praktik sebagai berikut:

- a. Meregistrasikan mata kuliah Implementasi Kebijakan Publik
- b. Mencari institusi/lembaga/organisasi tempat praktik dengan menyertakan Surat Pengantar Praktik yang dapat dimintakan pada UT Daerah masing-masing jika ingin melakukan observasi langsung
- c. Mendapatkan persetujuan tempat praktik institusi/lembaga yang dibuktikan dengan tanda tangan dan cap institusi/lembaga
- d. Melaksanakan kegiatan praktik sesuai materi yang dipilih dengan melakukan pengambilan data
- e. Mengumpulkan tugas 1 dan tugas 2 sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya

- f. Menulis laporan akhir pada tugas 3
- g. Mengikuti pembimbingan melalui tutorial webinar sebanyak 3 kali di setiap sesi 4,6 dan sesi 8.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Praktik dan Pihak Terkait

TAHAP	PIHAK		
	MAHASISWA	FHISIP/Prodi ADPU	TUTOR
Persiapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meregistrasikan mata kuliah Implementasi Kebijakan Publik 2. Mencari institusi/lembaga/organisasi tempat PIKP 3. Menentukan Materi untuk lingkup PKIP 4. Menentukan Judul Praktik 5. Mengajukan Pembimbing 6. Mengajukan Surat Pengantar 	Penetapan Pembimbing Praktik Implementasi Kebijakan Publik	Mengisi form Kesiediaan pembimbingan PIKP
Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan praktik Implementasi Kebijakan Publik 2. Mengikuti Proses Bimbingan 3. Mengerjakan atau mengupload tugas pada sesi 3 dan sesi 5 4. Menyusun Laporan Akhir Praktik dan diupload pada sesi 7. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan Praktik 2. Menerima laporan dan nilai praktik 	Membimbing mahasiswa praktik dan penulisan Laporan PKIP
Evaluasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima rekapitulasi nilai PKIP dari pembimbing 2. Memonitoring pelaksanaan pembelajaran 3. Validasi nilai praktik 4. Input nilai PKIP ke 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan nilai atas aktivitas mahasiswa praktik dan laporan akhir sesuai dengan format yang tersedia. 2. Menyerahkan rekapitulasi nilai akhir

		dalam aplikasi yang sudah disiapkan	PKIP atau laporan pelaksanaan mata kuliah kepada FHISIP/Prodi
--	--	-------------------------------------	---

E. PENILAIAN PELAPORAN

Prosedur Penilaian

Penilaian mata kuliah berpraktik mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti Praton (praktik *online*) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Pada kegiatan Praton terdapat beberapa tugas yang wajib dikerjakan oleh mahasiswa antara lain:

1. Mahasiswa menemukan isu/fenomena yang baik dan menetapkan teori dengan relevan dengan skor maksimal sebesar 30% (Tugas 1);
2. Mahasiswa mengumpulkan data dengan skor maksimal 35% (Tugas 2);
3. Mahasiswa menganalisis isu dan memberikan rekomendasi yang dituang dalam laporan praktik dengan skor maksimal 35% (tugas 3).

Selanjutnya, penilaian Praton berkontribusi sebesar 60% terhadap nilai akhir mata kuliah, sedangkan nilai Ujian Akhir Semester (UAS) berkontribusi sebesar 40% terhadap nilai akhir mata kuliah. Adapun secara total perhitungan nilai akhir mata kuliah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Akhir Mata Kuliah} = 40\% \text{ UAS} + 60\%$$

Kriteria Penilaian Praktik

Dalam kegiatan Praktik Implementasi Kebijakan Publik (PIKP), mahasiswa harus mengerjakan sebanyak 3 tugas (Tugas 1, Tugas 2, dan Tugas 3). Tugas 2 dapat diakses jika mahasiswa telah mengunggah tugas 1, dan tugas 3 dapat diakses jika mahasiswa telah mengunggah tugas 2. Untuk masing-masing format pengerjaan tugas antara lain sebagai berikut:

1. Tugas 1: Identifikasi Isu dan Penetapan Teori

Tugas 1 adalah mahasiswa harus menemukan isu atau fenomena yang tepat terkait sebuah kebijakan publik yang nyata dan relevan, kemudian mahasiswa menetapkan teori atau pendekatan yang akan digunakan untuk menganalisis implementasinya. Adapun format untuk mengumpulkan tugas pertama ini adalah:

- Halaman Judul (Judul, Nama, NIM, Prodi, Tutor Pembimbing)
- Latar Belakang Masalah (500-800 kata)
- Rumusan Masalah (pertanyaan utama)
- Tujuan Penulisan
- Penetapan Teori/Pendekatan (misalnya: Model Top-Down, Bottom-Up, atau Kombinasi, dll)
- Referensi 5 tahun terakhir (minimal sebanyak 5 dengan gaya APA)

Tabel 2. Pedoman Penilaian Tugas 1 (Bobot sebesar 30%):

Skor Maksimal: 100		
No.	Kriteria yang dinilai	Skor
1.	Relevansi isu atau fenomena yang dipilih	40
2.	Kesesuaian dan ketepatan teori	40
3.	Sistematika penulisan dan referensi	20
Total Skor		100

2. Tugas 2: Pengumpulan data

Tugas kedua mahasiswa adalah wajib mengumpulkan data pendukung baik melalui observasi, wawancara, atau menelaah dokumen/literatur untuk mendukung analisis implementasi kebijakan publik yang telah dipilih. Adapun format tugas 2 adalah:

- Halaman Judul (Judul, Nama, NIM, Prodi, Tutor Pembimbing)
- Latar Belakang Masalah (500-800 kata)
- Rumusan Masalah (pertanyaan utama)
- Tujuan Penulisan
- Penetapan Teori/Pendekatan (misalnya: Model Top-Down, Bottom-Up, atau Kombinasi, dll)
- Metodo Pengumpulan Data terdiri dari:
 - Jenis data
 - Teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dokumentasi)
 - Subjek/ narasumber (jika ada)
- Ringkasan hasil pengumpulan data
- Referensi 5 tahun terakhir (minimal sebanyak 5 dengan gaya APA)

- Lampiran (instrument wawancara, deokumentasi, dan lain-lain jika ada)

Catatan:

- 1) Jika melakukan studi literatur, sajikan dalam bentuk tabel sintesis literatur
- 2) Jika melakukan observasi atau wawancara, minimal satu narasumber

Tabel 3. Pedoman Penilaian Tugas 2 (Bobot sebesar 35%):

Skor Maksimal: 100		
No.	Kriteria yang dinilai	Skor
1.	Kejelasan dan kesesuaian metode	20
2.	Kualitas dan kedalaman data	35
3.	Ketepatan memilih narasumber atau dokumen	25
4.	Keterampilan dan kelengkapan lampiran	20
Total Skor		100

3. Tugas 3: Analisis dan Interpretasi Hasil

Tugas ketiga adalah mahasiswa diminta untuk menyajikan hasil analisis implementasi kebijakan publik berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta teori yang digunakan. Lakukan ini dalam sebuah laporan, dimana laporan merupakan integrasi dari tugas 1, tugas 2 dan tugas 3. Adapun format laporan tugas 3 sebagai berikut:

- Halaman Judul
- Pendahuluan (berisikan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penulisan)
- Kajian Teori
- Metode Pengumpulan Data
- Hasil dan Analisis
- Kesimpulan dan Saran
- Daftar Pustaka
- Lampiran

Tabel 4. Pedoman Penilaian Tugas 3 (Bobot sebesar 35%):

Skor Maksimal: 100		
No.	Kriteria yang dinilai	Skor
1.	Kekuatan analisis dengan teori	35
2.	Ketajaman interpretasi dan diskusi	30
3.	Keterkaitan antara data dan teori	20

4.	Kualitas penulisan, sistematika dan etika akademik	15
Total Skor		100

F. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan mata kuliah berpraktik dilakukan oleh program studi dengan cara sebagai berikut:

1. Program studi akan memonitoring keaktifan mahasiswa dan tutor setiap minggunya
2. Program studi akan memonitoring pelaksanaan tuweb ke-3
3. Program studi akan memonitoring tutor untuk melakukan penilaian terhadap tugas 1, tugas 2, dan tugas 3
4. Program studi akan memberikan form evaluasi kepada mahasiswa sebagai refleksi selama pembelajaran dengan indikator penilaian mencakup materi, komunikasi dengan tutor, dan cara penyampaian tutor dalam memberikan penjelasan atau pembimbingan.

G. DAFTAR ISTILAH

1. Praktik Implementasi Kebijakan Publik (PIKP) merupakan kegiatan pengamatan dan analisis pada hasil dari tindakan pemerintah terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dengan menggunakan indikator implementasi kebijakan publik yang sesuai dengan teori yang relevan. Dalam melakukan kegiatan PIKP ini, mahasiswa diharapkan dapat menggunakan sumber dari berbagai literatur, mahasiswa juga diharapkan memperoleh pemahaman yang cukup untuk menyusun logika, gagasan, dan konsep untuk membangun pandangan tentang implementasi kebijakan. Pada akhirnya dapat disusun kesimpulan/rekomendasi apakah suatu kebijakan tersebut sudah dilakukan dengan baik dan benar.
2. Kemampuan melakukan praktik ini bersifat khas yang hanya akan dikuasai mahasiswa apabila yang bersangkutan memiliki pengalaman nyata atau buatan melalui pengerjaan latihan atau tugas-tugas praktik
3. Kegiatan praktik dilaksanakan di bawah bimbingan tutor/instruktur/supervisor/pembimbing.
4. Tutor adalah dosen atau praktisi di bidang kebijakan publik yang diberikan tugas membimbing pelaksanaan praktik hingga penulisan laporan akhir praktik.